



Optimalisasi Manajemen Rantai Pasok Logistik Strategis Pasca-Sentralisasi Guna Mendukung Kesiapan Operasional Alutsista

Usman Ali*¹, Zubaidi Budi Hartanto², Rina Marlina³, Achmad Faisal⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: usmanaini55@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-03	This study examines the implications of the centralization policy for the management of logistics, particularly Fuel and Lubricants (BMP), on the operational readiness of the Main Weapon Systems (Alutsista) in the military environment. Changes in defense logistics governance require institutional adaptation to ensure the smoothness of the strategic supply chain from the central level to the maneuvering fleet. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the new logistics system and formulate a quick response mechanism so that combat and patrol operational support remains optimal amidst regulatory adjustments. The methodology used is descriptive qualitative with a case study approach at the headquarters level as the user unit. The results show that logistics centralization requires a balanced alignment between administrative order and tactical flexibility in the field. The conclusion of this study emphasizes that the reliability of the military supply chain does not only depend on budget efficiency but on the organization's adaptability in cutting BMP distribution bureaucracy latency to maintain power projection and continuous operational readiness.
Keywords: <i>Supply Chain;</i> <i>Military Logistics;</i> <i>Centralization;</i> <i>Operational Readiness;</i> <i>Alutsista.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-03	Penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan sentralisasi pengelolaan logistik, khususnya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP), terhadap kesiapan operasional Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) di lingkungan militer. Perubahan tata kelola logistik pertahanan menuntut adanya adaptasi institusional guna memastikan kelancaran rantai pasok strategis dari tingkat pusat hingga ke armada manuver. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas sistem logistik yang baru dan merumuskan mekanisme respons cepat (<i>quick response mechanism</i>) agar dukungan operasi tempur maupun patroli tetap berjalan optimal di tengah penyesuaian regulasi. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada tingkat markas besar selaku satuan pemakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi logistik membutuhkan penyesuaian yang seimbang antara ketertiban administrasi dengan fleksibilitas taktis di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keandalan rantai pasok militer tidak hanya bergantung pada efisiensi anggaran, melainkan pada kemampuan adaptasi organisasi dalam memangkas latensi birokrasi penyaluran BMP demi mempertahankan proyeksi kekuatan dan kesiapan operasi secara berkesinambungan.
Kata kunci: <i>Rantai Pasok;</i> <i>Logistik Militer;</i> <i>Sentralisasi;</i> <i>Kesiapan Operasional;</i> <i>Alutsista.</i>	

I. PENDAHULUAN

Dalam doktrin pertahanan negara mana pun, manajemen logistik adalah urat nadi yang menjamin daya tahan operasi dan kelancaran manuver pasukan. Khususnya pada lingkungan pertahanan maritim, keandalan dan daya gerak Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)—seperti kapal perang dan pesawat udara—sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya strategis secara persisten. Di antara seluruh komponen logistik, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) memiliki peran yang bernilai kritis, langka, dan tidak dapat digantikan, yang mana ketersediaannya akan secara mutlak menentukan keberhasilan postur operasi maritim (Barney, 1991; Amandiri, 2024).

Belakangan ini, terjadi pergeseran paradigma kebijakan di ranah makro pertahanan melalui penerapan sentralisasi tata kelola logistik BMP di bawah wewenang kementerian terkait (Permenhan No. 5 Tahun 2020). Kebijakan ini secara esensial bertujuan mengoptimalkan efisiensi anggaran, menyeragamkan pengawasan, dan menjamin akuntabilitas penyaluran. Namun, transisi kebijakan ini memunculkan tantangan baru (Mott, 1972). Pengalihan wewenang pengelolaan memicu restrukturisasi birokrasi yang mengubah pola distribusi. Markas besar maritim yang sebelumnya memiliki kemandirian logistik otonom, kini harus menyesuaikan diri dengan sistem perizinan yang terpusat dan berjenjang.

Dinamika ini menimbulkan ironi operasional. Rantai pasok sentralistik yang didesain secara kaku demi penghematan ekonomi cenderung berasumsi bahwa kebutuhan operasi bersifat konstan. Padahal, hakikat operasi militer di laut menuntut rantai pasok yang responsif karena eskalasi ancaman dan perubahan cuaca membuat konsumsi BMP sangat fluktuatif. Ketiadaan mekanisme kedaruratan (*quick response mechanism*) dalam tata kelola baru ini berpotensi memicu hambatan administratif yang dapat mereduksi kesiapan armada laut (Hartanto, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem tata kelola BMP pasca-sentralisasi dan merumuskan strategi adaptasi institusional di internal markas besar. Kajian ini difokuskan pada analisis implikasi kebijakan birokrasi terhadap kesiapan Alutsista, guna mencari titik keseimbangan antara akuntabilitas tata kelola logistik negara dengan keluwesan dukungan taktis operasi di lapangan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mendalami fenomena tata kelola administratif di tingkat markas besar. Unit analisis dalam studi ini adalah mekanisme respons institusional dan efektivitas rantai pasok bahan bakar pasca-pengalihan kewenangan. Pemilihan sumber data dilakukan melalui *purposive sampling* yang melibatkan narasumber ahli (informan kunci) di lingkungan perencanaan logistik, inventori, dan pemeliharaan markas besar armada.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam untuk menggali perspektif struktural, studi dokumentasi terhadap regulasi pendukung dan laporan kesiapan armada, serta observasi konseptual terhadap mekanisme kerja staf. Data yang terkumpul diolah secara sistematis menggunakan pendekatan analisis tematik guna memetakan hubungan antara kerumitan prosedural dengan efektivitas distribusi logistik. Analisis ini ditujukan untuk memformulasikan penyelesaian praktis bagi pemangku kebijakan tanpa mengintervensi atau menyalahi pedoman regulasi pusat yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan mengharuskan adanya transisi drastis pada arsitektur manajemen rantai pasok militer. Pengalihan dari sistem yang semula fleksibel menjadi sistem yang ketat prosedur melahirkan kebutuhan adaptasi birokrasi secara seketika. Tabel 1 menguraikan perbedaan paradigma sistem rantai pasok BMP dan implikasinya terhadap operasionalisasi.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Manajemen Rantai Pasok Logistik BMP

Aspek Tata Kelola	Paradigma Desentralisasi (Sebelum Pengalihan)	Paradigma Sentralisasi Adaptif (Pasca Pengalihan Regulasi)
Pusat Kendali Otorisasi	Dikelola secara mandiri oleh instansi matra bersangkutan.	Terpusat di tingkat Kementerian (Markas besar matra berfungsi sebagai pengusul/pemakai).
Sifat Rantai Pasokan	Market-Responsive (berfokus pada kecepatan pemenuhan fluktuasi taktis di lapangan).	Physically Efficient (berfokus pada akuntabilitas, penghematan anggaran, dan ketertiban dokumen).
Mekanisme Darurat	Penggunaan alokasi penyangga/cadangan strategis dapat diputuskan dengan cepat oleh komandan wilayah.	Membutuhkan Quick Response Mechanism khusus yang disepakati untuk menjembatani prosedur perizinan berjenjang.
Model Pelaporan	Pencocokan data logistik yang lebih longgar.	Sinkronisasi data real-time berbasis digital (e-BMP) yang menuntut literasi dan kepatuhan tinggi dari operator.

Sumber: Diolah oleh penulis, (2026)

B. Pembahasan

Mengacu pada hasil pemetaan di Tabel 1, pergeseran dari sistem desentralisasi menuju sentralisasi melahirkan tantangan penyelesaian yang tidak dapat diabaikan. Untuk mencegah terjadinya kemerosotan kesiapan tempur Alutsista di laut, analisis pembahasan ini dikembangkan ke dalam tiga aspek utama:

1. Harmonisasi Akuntabilitas Administrasi dan Kelincahan Taktis

Strategi pengelolaan persediaan yang serba pasti dan konstan tidak akan sanggup mengimbangi dinamika taktis armada di perairan (Kumara & Nurhartonosuro,

2024). Kebijakan sentralisasi yang mengutamakan kelengkapan dokumen administratif (demi penertiban keuangan negara) kerap berbenturan dengan urgensi mobilitas pasukan yang menuntut kecepatan reaksi seketika. Oleh karena itu, markas besar selaku satuan pemakai (*end user*) harus secara proaktif merumuskan prosedur pintas administrasi (diskresi terukur) yang disepakati bersama kementerian, agar kepentingan audit tidak mengorbankan kecepatan penggelaran kapal perang dalam merespons ancaman di perbatasan (Wicaksono, Jayamahe & Pandjaitan, 2025).

2. Perancangan Mekanisme Respons Cepat (*Quick Response Mechanism*)

Dalam sistem distribusi yang hierarkis dan panjang, latensi atau keterlambatan adalah musuh utama logistik operasi. Permasalahan saat ini bukanlah kelangkaan fisik bahan bakar, melainkan sumbatan otorisasi perizinan. Institusi perlu membentuk sebuah *Quick Response Mechanism* (QRM) internal di *back office* staf perencanaan logistik. QRM ini berfungsi sebagai jembatan yang mengakselerasi verifikasi data usulan darurat dari pangkalan, menyusun pelaporan terintegrasi, dan memangkas waktu tunggu sehingga unsur tempur dapat segera diproyeksikan tanpa mengalami kelumpuhan taktis (Hartanto, 2016).

3. Adaptasi Literasi SDM terhadap Sistem Digitalisasi (e-BMP)

Optimalisasi sistem terpusat saat ini sangat mengandalkan pelaporan berbasis aplikasi elektronik (e-BMP). Transisi digital ini menyingkap tantangan baru di level operator daerah. Optimalisasi pelaporan digital tidak semata bertumpu pada ketersediaan jaringan keras, melainkan sangat menuntut ketersediaan SDM yang menguasai integrasi antara disiplin ilmu logistik militer dengan literasi digital modern (Ristanto, Zulkifli & Efendi, 2025). Ketidaksiapan operator di pangkalan luar dalam menggunakan aplikasi akan memperlambat rekonsiliasi data, yang pada gilirannya menghambat pencairan alokasi BMP dari pusat ke daerah.

Pada puncaknya, penyelesaian tantangan rantai pasok militer pasca-regulasi menuntut kompromi struktural. Angkatan bersenjata tidak boleh mengalami kemunduran kelincahan operasi akibat birokrasinya sendiri. Oleh karena itu, penguasaan atas sistem persediaan logistik yang adaptif adalah pilar tak terpisahkan dalam memastikan keberhasilan setiap operasi matra laut (Amandiri, 2024).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kebijakan sentralisasi pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) ke tingkat Kementerian berdampak signifikan terhadap restrukturisasi birokrasi dan manajemen rantai pasok di lingkungan matra laut. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi anggaran dan transparansi yang komprehensif, pelaksanaannya memunculkan risiko perlambatan (*latency*) dukungan logistik yang dapat mengancam kesiapan operasional Alutsista. Keberhasilan adaptasi terhadap regulasi baru ini sangat ditentukan oleh kemampuan institusi di tingkat markas besar dalam menyelaraskan prosedur akuntabilitas administratif dengan penciptaan *Quick Response Mechanism*, sehingga kebutuhan logistik operasi yang bersifat fluktuatif dan darurat dapat tetap terpenuhi dengan cepat.

B. Saran

Direkomendasikan kepada staf perencana logistik di tingkat Markas Besar untuk segera merumuskan Prosedur Tetap (Protap) internal khusus keadaan darurat yang disepakati bersama dengan pemangku regulasi di kementerian. Selain itu, diperlukan peningkatan program bimbingan teknis (*training*) terkait penggunaan aplikasi e-BMP bagi para juru bayar dan operator logistik di seluruh wilayah pangkalan, guna mencegah terjadinya hambatan birokrasi akibat asimetri rekonsiliasi data digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Amandiri, S. T. (2024) 'Arti Penting Gelar Logistik TNI AL Sebagai Komponen Penentu Keberhasilan Operasi Matra Laut', *Jurnal Maritim Indonesia*, 12(3), pp. 48-60.
- Barney, J. (1991) 'Firm Resources and Sustained Competitive Advantage', *Journal of Management*, 17(1), pp. 99-120.

- Hartanto, Y. (2016) 'Manajemen Logistik Dalam Meningkatkan Kesiapan Tempur Alutsista TNI AL', *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1), pp. 1-15.
- Kumara, D., & Nurhartonosuro, I. M. (2024) 'Strategi Pengelolaan Inventory Yang Efektif Dan Efisien Di TNI AL Tantangan Serta Solusinya', *Jurnal Riset Manajemen*, 5(2), pp. 284-293.
- Mott, P. E. (1972) *The Characteristics of Effective Organizations*. New York: Harper & Row. (Buku Teks).
- Ristanto, D., Zulkifli, M., & Efendi, D. (2025) 'Optimalisasi Sistem Elektronik Bahan Bakar Minyak Dan Pelumas (E-BMP) Guna Kelancaran Distribusi Di Babek TNI', *Jurnal Inovasi Teknologi Pertahanan*, 8(11), pp. 12437-12441.
- Wicaksono, A., Jayamahe, J., & Pandjaitan, M. (2025) 'Efektivitas Strategi Penggelaran Unsur KRI Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Maritim Di ALKI III', *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(11), pp. 12602-12605.